



LAPORAN RESES

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024 / 2025

8 s/d 15 FEBRUARI 2025

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

SELASA, 18 MARET 2025

Dibacakan Oleh:

H. TUGIMAN B SEMITA, S.P.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Yang Kami Hormati, Gubernur Jawa Tengah

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran Eksekutif, Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia

Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2024/2025 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah kami laksanakan pada tanggal 8 s/d 15 Februari 2025 berlokasi di daerah pemilihan se-Jawa Tengah.

**Hadirin yang kami hormati,**

Dalam Reses Tahun Sidang II 2024/2025 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan agenda Reses di 11 daerah pemilihan:

1. Kota Semarang oleh Saudara H. Muhammad Afif, Lc
2. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal oleh Saudara H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I;

3. Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang oleh Saudari Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd
4. Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora dilaksanakan oleh Saudara Hafidz Alhaq Fatih, S.T;
5. Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen oleh Saudara H. Dedy Endriyatno;
6. Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta oleh Saudara Martono, S.Pd, M.Si;
7. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang oleh Saudara H Tugiman, S.P;
8. Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga oleh Saudara H. Karsono, S.Pd.I;
9. Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap oleh Saudara Setyo Arinugroho, S.H;
10. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan oleh saudara Much. Muchis Ariston, S.T;
11. Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo oleh saudara Amir Masduki, S.Pd.I;

### **Hadirin Yang Kami Hormati**

Adapun aspirasi, masukan, saran temuan selama kegiatan reses secara khusus di antaranya sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah juga mencatat bahwa terjadi inflasi 0,76% pada bulan januari dan pada bulan febuari mengalami deflasi sebesar 0,09%. Ini menandakan bahwa sedang terjadi permasalahan terkait daya beli masyarakat yang semakin menurun. Menjadi kebijakan yang sangat baik dimana pemerintah terus menciptakan dan mendorong supaya terjaga daya beli masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pemerintah

melakukan potongan hingga 50 persen tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Harapan kami program ini terus digulirkan untuk memacu pergerakan ekonomi dalam masyarakat terlebih menjelang lebaran.

2. Selama musim penghujan di daerah Jawa Tengah, terjadi beberapa bencana yang menimpa masyarakat baik tanah longsor maupun banjir. Penanganan yang dilakukan cukup baik, tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana pencegahan bencana tersebut. Karena beberapa bencana tersebut sudah menjadi langganan. Salah satunya adalah kondisi rob dan air hujan yang bersatu sehingga sungai tidak bisa menampung volume air yang ada. Tepatnya beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Banjir juga meluas hingga pedukuhan Pasirsari, Kelurahan Pasir Kraton Kramat dengan tinggi air mencapai 1 meter. Aktivitas warga yang sebagian besar membatik, lumpuh total akibat banjir kiriman tersebut. Sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian daerah sekitar. Pemerintah provinsi perlu melakukan langkah-langkah strategis guna memberikan solusi yang terbaik dan terukur serta jelas tahapan-tahapan penanganannya. Seperti halnya diperlukan operasi penindakan berkaitan dengan penggunaan air dalam yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dan beberapa masyarakat. Dampak dari eksploitasi tersebut membuat penurunan muka tanah terutama di pesisir utara Jawa seperti di Kota Pekalongan, Kota Semarang dan lainnya. Hal tersebut memicu air laut Kembali menggenangi daratan atau rob semakin tinggi.
3. Walaupun daerah rawan bencana tersebut sudah diidentifikasi sebagai daerah yang menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Tetapi belum ada langkah-langkah yang sistematis dari pemerintah untuk melakukan pencegahan lebih lanjut. Terlihat

kegiatan-kegiatan penambangan terus berjalan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada, disamping itu perlu pengawasan yang ketat dalam meloloskan AMDAL dalam perijinan pembangunan gedung atau kawasan yang membuat terganggunya keseimbangan lingkungan. Kami mendorong dinas terkait untuk kembali memprioritaskan kegiatan yang mampu mencegah bencana tersebut.

4. Sumber daya manusia di Jawa Tengah sangat melimpah dan angka pengangguran tercatat semakin menurun. BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah per Agustus 2024 tercatat mencapai 21,91 juta orang. Sementara jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 20,86 juta orang. Dari jumlah tersebut ada 12,44 juta orang bekerja di sektor informal. Postur angkatan kerja diatas masih didominasi bahwa angkatan kerja paling banyak di sektor formal. Yang menjadi keprihatinan kita bahwa angka pemutusan kerja di Jawa Tengah cukup tinggi. Disnakertrans Jateng memberikan data bahwa ada 7.437 pekerja di PHK pada tahun 2024. Bahkan ada ancaman PHK selanjutnya adalah dampak pailit PT. Sritek dan tercatat ada kurang lebih ada 10 ribuan pekerja yang terancam PHK. Maka perlu adanya langkah-langkah yang cukup strategis dari pemerintah untuk membantu supaya tidak terjadi PHK dan diperlukan sosialisasi kembali kepada masyarakat berkaitan peluang kerja yang ada di beberapa Kawasan Industri baik di Kendal, Batang, dan Kota Semarang yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.
5. Jawa Tengah sudah semestinya menjadi provinsi paling makmur, karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Tetapi persoalan seperti pupuk, bibit, mahalnya operasional hingga ketidakjelasan penjualan produk pertanian menyebabkan

pendapatan petani masih begitu minim dan jauh dari kata sejahtera di Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pertanian saat ini belum menguntungkan petani. Hal tersebut menjadi aduan dari warga Kecamatan Tawang Sari dan sekitarnya di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu Pemerintah harus hadir menyelesaikan. Pupuk harus tercukupi. Saat panen, ada kepastian hasil pertanian dibeli oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan. Kalau seperti itu, maka regenerasi petani akan berjalan. Langkah penyelesaian Pemerintah haruslah konkret dan tidak mempersulit masyarakat. Dalam penjaminan kesejahteraan misalnya, masyarakat tak perlu dipersulit dengan prosedur bantuan yang berbelit-belit. Yang masyarakat harapkan adalah solusi konkret, bukan janji jaminan kesejahteraan dengan prosedur yang berbelit-belit.

6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dimana pemerintah akan membeli Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan meniadakan rafaksi harga gabah. Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat memproduksi demi swasembada pangan. Hal di atas perlu ditangkap oleh pemerintah daerah untuk mengawasi mekanisme secara teknis proses pembelian tersebut. Sehingga keinginan baik pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh petani. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta BULOG dan instansi terkait perlu untuk melakukan koordinasi untuk menjamin program tersebut dilaksanakan tepat sasaran.

7. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak, kedaulatan pangan jelas tak hanya menyangkut soal ketersediaan pangan yang bermutu dan bergizi. Pemerintah tentunya perlu memberikan jaminan keamanan produk dari bahan-bahan non-halal yang dilarang dalam agama Islam. Maka perlu kita pastikan ketersediaan dan penjaminannya. Lebih jauh lagi, jaminan produk halal ini turut mendukung tumbuhnya ekonomi syariah bila kita hubungkan dengan ketahanan ekonomi bahkan investasi. Jaminan produk halal tidak boleh disederhanakan/disepelekan. Namun lisensi keamanan dan kehalalan produknya perlu terus dipermudah bagi seluruh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jaminan produk halal ini tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh disepelekan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah, akses lisensi halal untuk usaha kecil menengah, UKM harus terus dipermudah. Sementara itu, Ketahanan pangan dengan jaminan produk halal tidak dapat tercapai dengan sendirinya. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Selain melibatkan Dinas Koperasi & UKM dan lembaga terkait, sinergi dan kolaborasi juga perlu dilakukan dengan lembaga yang menyediakan dukungan penjaminan, pembiayaan, baik dari sektor pemerintah, swasta, LSM, hingga media massa dan penyiaran.
8. Menjelang libur lebaran, Provinsi Jawa Tengah justru harus dirisaukan dengan ancaman banyaknya bencana dan kerusakan infrastruktur terutama jalan. Banyaknya keluhan masyarakat berkaitan dengan rusaknya jalan ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah. Dimana kita ketahui bahwa jalan merupakan jalur vital dalam keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dinas terkait perlu segera melakukan langkah-langkah cepat dan strategis guna menyelesaikan kerusakan tersebut. Sehingga

masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, baik untuk jalur transportasi umum maupun jalan mudik saat menjelang lebaran.

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah menyebut terdapat empat bahan pokok yang perlu diwaspadai, yakni cabai merah, telur, daging, dan minyak goreng. Beberapa harga bahan pokok tersebut memang tak kunjung turun dalam beberapa waktu terakhir. IKPPI menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi lantaran minimnya angka produksi. Hal ini disampaikan Ibu-ibu PKK Winduaji Paguyangan Brebes yang menyampaikan keluhannya terkait kenaikan harga pangan yang terus menerus melonjak dalam dua bulan terakhir. Meski belum ada permintaan yang signifikan, perlu adanya tindakan antisipasi dari Pemerintah untuk menghindari lonjakan harga di pasar. Disperindag provinsi dan daerah harus turun tangan melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memantau kenaikan harga bahan pokok yang diwaspadai. Demikian juga dengan Satgas terkait di Polda Jateng dapat memaksimalkan upaya pengawasan distribusi demi menjamin stabilitas harga pasar. Peran Polda juga sangat penting untuk mengawasi distribusi agar tak ada kasus penimbunan oleh oknum. Sementara itu, daya beli masyarakat terhadap bahan pokok seperti cabai semakin melesu lantaran harga yang tak kunjung turun dalam dua bulan terakhir. Pembeli mengaku harus mengurangi stok barang dagangnya karena berpotensi membusuk sehingga tak dapat dijual.

Demikianlah beberapa hal yang menjadi masukan dan temuan selama masa Reses anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami harap Saudara Gubernur bisa memperhatikan serta menindaklanjutinya. Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh*

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

H. MUHAMMAD AFIF, Lc  
KETUA

ttd

H. SURURUL FUAD, Lc., M.E.I  
SEKRETARIS